

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Hak korban untuk mendapatkan restitusi menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diimplementasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dalam hal ini mempunyai peran penting sebagai suatu lembaga yang dapat menjamin hak – hak korban. Dalam mewujudkan hak korban tersebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan langkah – langkah yang sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana untuk menjamin keamanan korban tindak pidana, memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap korban tindak pidana untuk melakukan pengajuan permohonan restitusi, dan juga telah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Peraturan – Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban kepada seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana yang terdapat dalam buku dua (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga

sering menghadapi kendala dalam mengimplementasikan hak korban tersebut. Secara Yuridis kendala tersebut timbul dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri dan juga timbul dari peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan – Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan secara Non Yuridis kendala tersebut timbul dari pihak yang menjadi korban itu sendiri dan kendala lainnya perbedaan pemahaman mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi diantara para penegak hukum dengan lembaga perlindungan saksi dan korban.

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan penulis adalah besar harapan agar kedepannya dalam mengimplementasikan hak korban untuk mendapatkan restitusi lebih diperhatikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Meminta DPR untuk merevisi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindaungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
2. Meminta Dukungan dan Bantuan dari para penegak hukum.
3. Menginstruksikan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana maupun yang tidak menjadi korban tindak pidana untuk ikut berperan aktif dalam hal penanganan restitusi.

4. Kepada para aparat penegak hukum untuk menyamakan pendapat dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar dalam mengimplemtasikan hak korban tersebut dapat berjalan dengan lancar.
5. Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sendiri agar lebih memperbanyak kegiatan sosialisasi tentang penanganan korban khususnya dalam hal hak korban untuk mendapatkan restitusi dimulai dari pusat hingga ke daerah – daerah; dan
6. Lebih memperluas dan/atau memperbanyak perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah – daerah lain, karena menurut penulis bahwa kurangnya ketidaktahuan dari masyarakat dan korban itu sendiri tentang hak korban korban untuk mendapatkan restitusi menjadi salah satu faktor penyebab tidak semua korban tindak pidana mendapatkan hak tersebut.

Daftar Pustaka

Buku :

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1994, *Pertemuan Ilmiah Tentang Pola Pembinaan, Penerimaan Bekas Narapidana Dan Pemberian Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1988, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.

Ediwarman, 1999, *Victimologi Kaitannya dengan Ganti Rugi Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sahetapy J E, ed, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, pustaka sinar harapan, Jakarta.

Siswanto Sunarso H, 2012, *Viktimologi Dalam sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soeharto H, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Jakarta.

Widiatana G, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yahya Harahap M, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Ed.2, cet.3, sinar grafika, Jakarta.

Jurnal :

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011, *laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2012, *laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*

Aryadi G, 2011, Laporan penelitian, *Tinjauan Terhadap UU N. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban prespektif perbandingan hukum pidana.*

Paulinus Soge, 2011, Laporan Penelitian, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Aborsi yang Dilakukan Di Kawasan Pedesaan DIY (Studi DI Wilayah Hukum PN Wonosari).*

Website :

<http://www.tempo.co/read/kolom/2013/01/24/641/Tantangan-Berat-Restitusi-Korban-Kejahatan>, L.R. Baskoro, *Tantangan Berat Restitusi Korban Kejahatan*, Senin 18 maret 2013.

<http://regional.kompas.com/read/2011/09/21/21532855/Korban.Perkosaan.Harus.Dapat.Perlindungan.dan.Restitusi>, Korban Perkosaan Harus Dapat Perlindungan dan Restitusi, senin 18 maret 2013.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.



Lampiran



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

SURAT KETERANGAN NOMOR : KET-029/UNIT.DH/LPSK/11/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Febriyanto, S.I.Kom
Jabatan : Asisten Unit Diseminasi dan Humas
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hendrik Renyaan
Nomor Mahasiswa : 080509823
Universitas : Program Sarjana (S-I) Ilmu Hukum Universitas
Atmajaya Yogyakarta

Telah melakukan pengumpulan data sebagai bagian dari skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Implementasi Hak Korban untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”**. Adapun riset tersebut telah dilaksanakan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada bulan **Mei** 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Samuel Febriyanto, S.I.Kom